

DEWAN KOMISARIS DAN *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Lia Uzliawati

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten, 42118, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between board of commissioner and intellectual capital disclosure in Indonesia Banking Industry. The purpose of this study was to examine the relationship between the board of commissioner and intellectual capital disclosure in Indonesia Banking Industry. The intellectual capital disclosure measurement in this study used the index developed by Sveiby (1997). The data were collected from 31 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2012. The disclosure of intellectual capital measurement in this study used the index developed by Sveiby (1997). The Data were collected from 31 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2008-2012. This study finds that size, independent commissioner, and meeting frequency have positive relationship with intellectual capital disclosure. This study found that the size, independent commissioner, and meeting frequency had a positive relationship with intellectual capital disclosure. The finding of this research can be as a reference and portrait that board of commissioner already aware the importance of ICD. The finding of this research could be as a reference and portrait that board of commissioner was already aware of the importance of ICD.

Keywords: *board of commissioner, corporate governance, Intellectual Capital Disclosure, banking industry*

Intellectual capital saat ini dianggap sebagai faktor kesuksesan bagi suatu organisasi dan karenanya akan semakin menjadi perhatian dalam kajian strategi organisasi dan strategi pembangunan. Di abad ini, komunitas bisnis seluruh dunia sepakat bahwa *knowledge asset* menjadi sangat penting dalam pengkreasian nilai perusahaan dibandingkan dengan faktor produksi fisik (Saleh *et al.*, 2007). Guthrie & Petty (2000) telah melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa *knowledge*

dan *intellectual capital* menimbulkan pengaruh yang lebih besar dan menjadi komoditas penting bagi ukuran nilai bisnis suatu perusahaan dibandingkan ukuran keuangan.

Rupert (1998), mengatakan bahwa dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh suatu cara dalam menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing. *Intellectual capital* juga menjembatani

Korespondensi dengan Penulis:

Lia Uzliawati: Telp. +62 254 20330

E-mail: uzliawati@yahoo.co.id

adanya ketidak sesuai informasi (*information gap*) yang timbul antara pihak manajer dan pemilik perusahaan, maka *intellectual capital disclosure* merupakan informasi yang berguna bagi *investor* untuk membantu mengurangi ketidakpastian mengenai prospek masa depan perusahaan dan membantu dalam memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap perusahaan (Bukh *et al.*, 2003).

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *intellectual capital disclosure* telah dilakukan oleh Guthrie & Petty (2000) di Australia, Bozzolan *et al.* (2003) di Italy, Goh & Lim (2004) di Malaysia, dan Guthrie *et al.* (2006) di Australia dan Hongkong menghasilkan bahwa pengungkapan elemen *Intellectual Capital* untuk *external capital* lebih tinggi dibandingkan dengan pengungkapan *internal capital* dan *human capital*-nya. Purnomosidhi (2006) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada interval tahun 2001-2003, menghasilkan bahwa hanya 18% yang telah melakukan *intellectual capital disclosure*, sementara itu hasil penelitian Suhardjanto & Wardhani (2010) menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 34% perusahaan telah melakukan *intellectual capital disclosure*. Persentase peningkatan *intellectual capital disclosure* tersebut masih di bawah 50%.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keberadaan dewan komisaris pada perusahaan khususnya perbankan dapat memengaruhi tingkat *intellectual capital disclosure*. Cerbioni & Parbonetti (2007), *corporate governance* dan *disclosure* memiliki keterkaitan. *Corporate governance* merupakan konsep yang menekankan pentingnya melakukan *disclosure* secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi baik yang bersifat wajib (*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*) (Sabeni, 2005). Aplikasi *corporate governance* tercermin dari dewan komisaris (Surya & Yustia Vandana, 2006) yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dalam menciptakan *value added* untuk semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Beasley & Mark, 1996 dan Chtourou & Bedard, 2001).

Dewan komisaris selayaknya memiliki kompetensi maupun independensi yang baik agar dapat mendukung efektivitas kinerjanya. Pernyataan tersebut didukung juga oleh beberapa penelitian seperti: Chtourou & Bedard (2001), Eng & Mak (2003), Cheng & Courtenay (2006), dan Nor *et al.* (2010). Keberadaan pihak-pihak independen tersebut yang tidak terpengaruh oleh pihak mana pun diharapkan dapat menciptakan keseimbangan sehingga dapat menghindari konflik kepentingan pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholder* (Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP).

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk. Terlebih lagi dalam industri perbankan *corporate governance* memiliki level signifikansi yang lebih tinggi karena bank memobilisasi simpanan masyarakat yang bergantung pada kepercayaan publik dan memiliki *stakeholder* yang lebih bervariasi (Darmadi, 2013). Dewan komisaris dapat memberikan keahlian yang lebih luas dalam memengaruhi *disclosure* atas informasi yang dimiliki oleh perusahaan (Li *et al.*, 2008). Keberadaan dewan komisaris dalam perusahaan diharapkan mampu memberikan dorongan pada perusahaan untuk melakukan *disclosure* terutama *voluntary disclosure* yang dapat memberikan informasi tambahan terhadap investor.

Definisi *intellectual capital* yang diterima umum dan pengkategorian *intellectual capital* masih beragam, namun klasifikasi yang dikembangkan Sveiby (1997) mendapatkan penerimaan secara universal dan telah banyak digunakan oleh sejumlah peneliti baik di negara maju maupun negara berkembang (Guthrie & Petty, 2000; Bozzolan *et al.*, 2003; Goh & Lim, 2004; Abeysekera, 2007; Yi & Davey, 2010). Sveiby (1997) mengklasifikasikan *intellectual capital* menjadi *internal structure*, *external structure*, dan *employee competence*. Kategori ini kemudian direklasifikasi oleh Guthrie & Petty (2000) menjadi *internal capital*, *external capital*, dan

human capital, karena menganggap *intellectual capital* terdiri dari kategori *capital* dibandingkan *structure* (Guthrie & Petty, 2000, Abeysekera & Guthrie, 2005, dan Abeysekera, 2008).

Cerbioni & Parbonetti (2007) menuturkan bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. *Intellectual capital disclosure* secara tradisional berhubungan dengan informasi seperti penelitian dan pengembangan (R&D), *software*, pemasaran dan pelatihan, yang telah disajikan pada laporan perusahaan sebagai penjelasan gambaran akuntansi (Bozzolan *et al.*, 2003). Namun pendekatan tradisional ini tidak bisa memasukkan identifikasi baru untuk *intangible asset* seperti kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, sistem administrasi, sistem *database*, dan lainnya, yang dianggap sebagai pendongkrak baru nilai perusahaan dalam organisasi *knowledge-based* (Guthrie & Petty, 2000).

HIPOTESIS

Ukuran Dewan Komisaris

Asumsi dalam teori agensi menyebutkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Hidalgo *et al.* (2011) bahwa ukuran dewan komisaris yang besar bisa menguntungkan karena mereka dapat meningkatkan keahlian dan sumber daya yang ada di dalam perusahaan.

Allegrini & Greco (2011) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*, seperti *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) serta Abeysekera (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H₁: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

Proporsi Dewan Komisaris

Menurut teori agensi, dewan komisaris independen mampu meningkatkan keefektifan peran dewan komisaris (Jensen & Meckling, 1976). Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa dewan komisaris independen dapat melakukan peman-tauan manajemen yang efektif dan pengendalian kegiatan internal perusahaan. Li *et al.* (2008) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah:

H₂: proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan asumsi teori agensi, semakin seringnya dewan komisaris mengadakan rapat, maka diharapkan mekanisme *monitoring* dapat dilakukan semakin efektif. Mekanisme tersebut tentu akan memberi dorongan dan tekanan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai *intellectual capital* dengan baik dan relevan sehingga akan meningkatkan *intellectual capital disclosure*.

Hasil penelitian Achmad (2012) menemukan hubungan positif antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas maupun kuantitas laporan *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah:

H₃: frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris berpengaruh ter-

hadap pengetahuan yang dimilikinya (Kusumastuti *et al.*, 2007 dan Rose, 2007). Selanjutnya dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan menjadi lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah:

H₄: latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris

Keberadaan dewan komisaris wanita dianggap dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan atas *intellectual capital*, karena sifat wanita yang sangat berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan dibandingkan pria (Kusumastuti *et al.*, 2007).

Dewan komisaris wanita juga dapat mengkomunikasikan kepada manajemen akan pentingnya melakukan praktik *intellectual capital disclosure* untuk menambah nilai perusahaan. Dengan kata lain, seiring meningkatnya permintaan untuk *intellectual capital disclosure*, hal ini dapat mendorong peran dewan komisaris wanita dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, maka hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah:

H₅: keberada dan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*

METODE

Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat dan hubungan tertentu (Sekaran, 2006). Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2013. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari *annual*

report perbankan dari tahun 2008-2013 di www.idx.co.id dan situs perusahaannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Ukuran Dewan Komisaris (*Size_BOC*)

Variabel ukuran dewan komisaris penelitian ini mengacu pada penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) diukur dengan menjumlahkan anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan perbankan. Pengukuran yang dilakukan oleh Cerbioni & Parbonetti (2007) tersebut didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2010), Yammesri & Herath (2010), Hidalgo *et al.*, (2011), Haji & Ghazali (2013), serta Rashid & Islam (2013). Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan cara:

$Size_BOC = \Sigma$ Dewan komisaris

Proporsi Dewan Komisaris Independen (*BOC_IND*)

Variabel proporsi dewan komisaris independen penelitian ini juga mengacu pada penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) yang mengukur proporsi anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan perbankan. Pengukuran yang dilakukan oleh Cerbioni & Parbonetti (2007) tersebut didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2008), Yammesri & Herath (2010), Taliyang & Jusop (2011), dan Haji & Ghazali (2013). Proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan cara:

$$BOC_{IND} = \frac{\Sigma \text{board of commisioner independen}}{\Sigma \text{board of commisioner}} \times 100\%$$

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (*BOC_MEET*)

Variabel frekuensi rapat dewan komisaris dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Vafeas (2009) dan didukung pula oleh

penelitian Li *et al* (2008), Taliyang & Jusop (2011), dan Haji & Ghazali (2013) yang mengukur frekuensi rapat dewan komisaris dengan total jumlah rapat dewan komisaris yang dilakukan dalam satu tahun. Frekuensi rapat dewan komisaris dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$BOC_MEET = \Sigma \text{Rapat dewan komisaris setahun}$$

Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

Sesuai dengan peraturan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Indikator yang digunakan seperti dalam penelitian Rose (2007) dan Kusumastuti *et al.*, (2007) dengan mengukur persentase anggota dewan komisaris berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dengan rumus sebagai berikut:

$$BOC_EDU = \frac{\Sigma \text{BOC berlatar pendidikan Akt /bisnis}}{\Sigma \text{BOC}} \times 100\%$$

Dewan Komisaris Wanita (BOC_FEM)

Indikator anggota wanita dewan komisaris dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Carter *et al.*, (2002) yaitu dengan menggunakan persentase anggota dewan komisaris wanita terhadap seluruh anggota dewan komisaris. Pengukuran yang dilakukan oleh Carter *et al.*, (2002) tersebut didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti *et al* (2007) dan Rose (2007). Indikator proporsi anggota wanita dewan komisaris dapat dihitung dengan cara:

$$BOC_FEM = \frac{\Sigma \text{board of commissioner wanita}}{\Sigma \text{board of commissioner}} \times 100\%$$

Atribut-atribut *intellectual capital* diadopsi dari model Sveiby (1997) dengan item-item pengukuran sebanyak 25 item yang terdiri dari: *capital* (9), *external capital* (10), dan *human capital* (6). Teknik

pengukuran menggunakan pengukuran *scoring*, jika item tersebut diungkapkan dalam *annual report* maka diberikan skor 1 dan skor 0 jika item tersebut tidak diungkapkan dalam *annual report*.

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan persamaan regresi berganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. Persamaan regresi berganda pada hipotesis penelitian ini:

$$ICD = \alpha + \beta_1 BOC_SIZE + \beta_2 BOC_IND + \beta_3 BOC_MEET + \beta_4 BOC_EDU + \beta_5 BOC_FEM + \epsilon$$

Keterangan:

ICD : *Intellectual Capital Disclosure*

BOC_SIZE : ukuran dewan komisaris

BOC_IND : proporsi dewan komisaris independen

BOC_MEET : frekuensi rapat dewan komisaris

BOC_EDU : latar belakang pendidikan dewan komisaris

BOC_FEM : dewan komisaris wanita

HASIL

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008-2013 yang berjumlah 155 perusahaan.

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskripsi statistik terhadap variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Max	Min	Mean	Std. Dev
<i>Intellectual Capital Disclosure</i>	0,735	0,217	0,524	0,105

Dewan Komisaris dan *Intellectual Capital Disclosure* pada Perbankan di Indonesia

Lia Uzliawati

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa rerata *intellectual capital disclosure* pada perbankan Indonesia sebesar 52,4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *intellectual capital disclosure* pada perbankan lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa perbankan Indonesia sudah memahami pentingnya *intellectual capital disclosure* dan telah menyadari akan keuntungan yang mereka peroleh ketika melakukan *intellectual capital disclosure*.

Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada variabel jumlah dewan komisaris memiliki nilai rerata sebesar 4,61 yang artinya jumlah dewan komisaris dalam sampel penelitian ini sebesar 5 orang (pembulatan). Hal ini menunjukkan bahwa rerata jumlah dewan komisaris pada perbankan sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa (1) jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga)

orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, (2) paling kurang 1 (satu) anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 yang menyatakan bahwa (1) dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, (2) paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan Indonesia telah mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang berlaku untuk menciptakan *corporate governance*.

Rerata pada Tabel 2 menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris dan rerata latar belakang pendidikan dewan komisaris telah sesuai dengan nomor 8/4/PBI/2006. Selain itu, perusahaan perbankan juga telah memiliki dewan komisaris wanita, sifat wanita yang komunikatif, teliti dan hati-hati menjadi nilai tambah tersendiri dalam menjalani tugasnya sebagai dewan komisaris.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Max	Min	Mean	Std. Dev
Ukuran Dewan Komisaris	9,00	2,00	4,61	2,04
Proporsi Dewan Komisaris Independen	1,00	0,33	0,52	0,21
Frekuensi Rapat	57,00	3,00	13,28	13,75
Latar Belakang Pendidikan	0,75	0,11	0,31	0,17
Dewan Komisaris Wanita	1,00	0,16	0,08	0,14

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Coefficient	Standar Error	P-value
Konstanta	0,217	0,054	0,000
Ukuran Dewan Komisaris	0,021**	0,008	0,007
Proporsi Dewan Komisaris Independen	0,276**	0,075	0,000
Frekuensi Rapat	0,004**	0,001	0,000
Latar Belakang Pendidikan	0,053	0,090	0,556
Dewan Komisaris Wanita	- 0,009	0,106	0,935
Adj. R ²	0,236		
F-Statistic	10,532		

Keterangan: ***, **, * menunjukkan koefisien signifikansi pada 0,01; 0,05; dan 0,1

Hasil Regresi Berganda

Dengan menggunakan program olah data statistik, maka hasil pengujian dengan analisis regresi berganda ditunjukkan pada Tabel 3.

Nilai *adjusted R square* pada Tabel 3 adalah sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 23,6% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Sedangkan, latar belakang pendidikan dewan komisaris dan keberadaan dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

PEMBAHASAN

Fenomena global yang menunjukkan permintaan agar perusahaan lebih menyuguhkan informasi non-keuangan yang berguna dan komprehensif terkait aktivitas perusahaan, membuat banyak perusahaan mencoba untuk melengkapi pelaporan keuangan tradisional mereka dengan menambahkan informasi non-keuangan yang berupa *intellectual capital* (Abeysekera & Guthrie, 2005). *Intellectual capital disclosure* merupakan suatu laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang tidak dapat memerintahkan pembuatan laporan tentang *intellectual capital* (Neysi *et al.*, 2012).

Fenomena meningkatnya *intellectual capital disclosure* pada beberapa negara berpengaruh juga pada perbankan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini tingkat *intellectual capital disclosure* mencapai 52%. Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak 18% dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhardjanto & Wardhani (2010) yaitu sebesar 34%.

Peningkatan *intellectual capital disclosure* pada perbankan menunjukkan bahwa perbankan sudah mulai menyadari pentingnya *intellectual capital* untuk diungkapkan, meskipun masih merupakan pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena *intellectual capital disclosure* dapat mengurangi adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak *stakeholder* (Li *et al.*, 2008) dan *intellectual capital disclosure* dapat menyajikan persentasi yang signifikan dari total nilai perusahaan (Guthrie *et al.*, 2006).

Perbankan sebagai perusahaan yang menggunakan basis pengetahuan meningkatkan kekuatan kompetitifnya dan nilai perusahaan dengan memaksimalkan kemampuan karyawan, hak paten, inovasi dari pengetahuan yang dimiliki (Edvinson & Sullivan, 1996; Bukh *et al.*, 2005). Neysi *et al.*, (2012) juga menyebutkan bahwa *intellectual capital disclosure* menyajikan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur *intangible asset* dan menggambarkan hasil aktivitas perusahaan yang berbasis pengetahuan atau *knowledge-based*.

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugasi untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan dan terlaksananya akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dewan komisaris dan *intellectual capital disclosure* pada perbankan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*, sedangkan latar belakang pendidikan dewan komisaris dan dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*.

Saran

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan sampel perbankan secara keseluruhan saja. Penelitian berikutnya diharapkan dapat membandingkan tingkat *intellectual capital disclosure* antara perusahaan perbankan BUMN dan non BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T. 2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship? *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1): 1-12.
- Abeysekera, I. 2007. Intellectual Capital Reporting Differences between A Developed and Developing Nation. *Journal of Intellectual Capital*, 8(2): 329-345.
- Abeysekera, I. 2008. Motivation behind Human Capital Disclosure in Annual Reports. *Accounting Forum*, 32 (1): 1-13.
- Abeysekera, I. 2010. The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4): 504-518.
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. 2005. An Empirical Investigation of Annual Reporting Trends of Intellectual Capital in Sri Lanka. *Critical Perspective on Accounting*, 16: 151-163.
- Allegrini & Greco, G. 2011. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 15(3): 1-30.
- Beasley & Mark, S. 1996. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, 71(4): 443-465.
- Bozzolan, S., Favotto, F., & Ricceri, F. 2003. Italian Annual Intellectual Capital Disclosure; An Empirical Analysis. *Journal of Intellectual Capital*, 4(4): 543-558.
- Bukh, P.N., Nielsen, C., Gomsen, P., & Mouritsen, J. 2005. Disclosure of Information on Intellectual Capital in Danish IPO Prospectuses. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 38(1): 33-53.
- Carter, D.A., Simkins, B.J., & Simpson W.G. 2002. *Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value*. Oklahoma State University.
- Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring The Effect of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, 16(4): 791-826.
- Cheng, E.C.M. & Courtenay, S.M. 2006. Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure. *The International Journal of Accounting*, 41: 262-289.
- Chtourou, S.M., & J. Bedard, 2001. *Corporate Governance and Earnings Management*. <http://papers.ssrn.com/abstract=275053>.
- Darmadi, S. 2013. Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Humanomics*, 29(1): 4-23.
- Edvinson, L., & Sullivan, P. 1996. Developing a Model for Managing Intellectual Capital. *European Management Journal*, 14(4): 356-364.
- Eng, L.L. & Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22: 325-345.
- Fama, E.F. & Jensen, M.C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 80(2): 539-561.
- Goh, P.C. & Lim, K.P. 2004. Disclosing Intellectual Capital in Company Annual Reports: Evidence from Malaysia. *Journal of Intellectual Capital*, 5(3): 500-510.
- Guthrie, J. & Petty, R. 2000. Intellectual Capital: Australian Annual Reporting Practices. *Journal of Intellectual Capital*, 1(3): 241-251.
- Guthrie, J., Petty, R., & Ricceri, F. 2006. The Voluntary Reporting of Intellectual Capital: Comparing Evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 7(2): 254-271.
- Haji, A.A. & Ghazali, N.A.M. 2013. *A Longitudinal Examination of Intellectual Capital Disclosures and Corporate Governance Attributes in Malaysia*. Emerald Group Publishing Limited.

- Hidalgo, R.L., Meca, E.G., & Matinez, I. 2011. *Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure*. *Journal of Business Ethics*, 100: 483-495.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 303-360.
- Kusumastuti, S., Supatmi, & Sastra, P. 2007. Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Coporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2): 88-98.
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2): 137-159.
- Neysi, S.H., Mazraeh, S., & Mousavi, Z. 2012. The Importance of Intellectual Capital Disclosure. *International Journal of Business and Social Science*, 3(15): 307-310.
- Nor, M.N.M., Shafie, R., & Wan-Husin, W.N. 2010. Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 6(2): 57-84.
- Purnomosidhi, B. 2006. Praktik Pengungkapan Modal Intelektual pada Perusahaan Publik di BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9(1): 1-20.
- Rashid, K. & Islam, S.M.N. 2013. Corporate governance, complementarities and the value of a firm on an emerging market: The effect of market imperfection. *Journal of Corporate Governance*, 13(1): 70-87.
- Rose, C. 2007. Does Female Board Representation Influence Firm Performance? *The Danish Evidence*". *Journal Compilation Publishing*, 15(2): 404-413.
- Rupert, B. 1988. The Measurement of Intellectual Capital. *Management Accounting Journal*. 76: 26-28.
- Sabeni, A. 2005. Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. Semarang
- Saleh, N. M., Rahman, M. R. C. A., & Hassan, M. S. 2007. Ownership Structure and Intellectual Capital Performance in Malaysia. *Paper Presented at the 20th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues*.
- Sekaran, U. 2003. *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*. 4th edition. John Wiley and Sons, Inc NY.
- Suhardjanto, D. & Wardhani, M. 2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14(1): 71-85.
- Surya, I. & Yustiavandana, I. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Sveiby, K.E. 1997. *The New organization wealth: Managing and Measuring Knowledge-based Assets*. San Fransisco, CA: Berret-Koehler Publishers.
- Taliyang, S.M, & Jusop, M. 2011. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Sturcture: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 6(2): 109-117.
- Vafeas, N. 2009. Board Meeting Frequency and Firm Performance. *Journal of Financial Economics*, 53(1): 113-142.
- Yammesri, J. & Herath S.K. 2010. Board Characteristic and Corporate Value: Evidence from Thailand. *Emerald Group Publishing Limited*, 10(2).
- Yi, A. & Davey, H. 2010. Intellectual Capital Disclosures in Chinese (Mainland) Companies. *Journal of Intellectual Capital*, 11(3): 326-347